Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
Vol. 4, No. 4, November 2026
Hal 531-537
E-ISSN : 3024-8752
P-ISSN : 3024-8744
Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/njms

Kesiapan Mahasiswa Administrasi Publik Dalam Menghadapi Kebijakan Rekognisi Artikel Jurnal Sebagai Pengganti Skripsi

Yudha Hino Hasaputra*, Rahmad Agung Satrio Bhekti, Galuh Al-Qorni Wahid, Ferdiansyah Baihaqi Salasa, Indah Prabawati, Meirinawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:
Received November 5, 2026
Revised November 5, 2026
Accepted November 6, 2026

Kata Kunci:
Kesiapan Mahasiswa,
Rekognisi Artikel Jurnal,
Implementasi Kebijakan,
Edwards III,
Administrasi Publik

Keywords:
Student Readiness,
Journal Article Recognition,
Policy Implementation,
Edwards III,
Public Administration

ABSTRAK

Kebijakan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir di Universitas Negeri Surabaya menuntut kesiapan mahasiswa yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kesiapan akademik dan sikap terhadap perubahan kebijakan. Penelitian ini menganalisis kesiapan mahasiswa Administrasi Publik dalam menghadapi kebijakan tersebut menggunakan empat variabel implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum merata dan konsisten, kesiapan sumber daya mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah masih terbatas, disposisi mahasiswa menunjukkan penerimaan bersyarat dengan kekhawatiran terhadap tuntutan publikasi, serta pemahaman prosedural terhadap mekanisme rekognisi masih perlu diperkuat. Penguatan sosialisasi, pendampingan penulisan, dan penyediaan panduan prosedural yang jelas diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

ABSTRACT

The policy of recognizing scientific journal articles as a substitute for final projects at Universitas Negeri Surabaya requires student readiness that encompasses not only administrative preparedness but also academic capability and attitudes toward policy changes. This study analyzes the readiness of Public Administration students in facing this policy using four policy implementation variables from Edwards III model: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was employed using semi-structured interviews, observation, and documentation involving students, supervisors, and academic administrators. The findings indicate that policy communication has not been evenly distributed and consistent, student resource readiness in scientific article writing remains limited, student disposition shows conditional acceptance with concerns about publication demands, and procedural understanding of recognition mechanisms still needs strengthening. Enhanced socialization, writing mentorship, and clear procedural guidelines are needed for successful policy implementation.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Yudha Hino Hasaputra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Indonesia
Email: yudha.23032@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menetapkan kebijakan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir melalui Surat Edaran Rektor Nomor B/97019/UN38/HK.01.01/2025 yang berlaku sejak 16 Juli 2025, memberikan kesempatan bagi mahasiswa jenjang D4 dan S1 untuk memperoleh rekognisi tugas akhir melalui publikasi artikel ilmiah [1]. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran pola akademik dari penyusunan skripsi menuju produk penelitian yang berorientasi pada publikasi ilmiah [2] dan [3]. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan mahasiswa yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga meliputi kemampuan penelitian, literasi akademik, penguasaan metodologi, dan keterampilan menulis artikel sesuai standar jurnal ilmiah [4] dan [5].

Kajian terdahulu mengenai transformasi tugas akhir berbentuk artikel ilmiah telah dilakukan pada beberapa perguruan tinggi, terutama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Fidhayanti et al. [6] menemukan persoalan terkait ketidakjelasan SOP dan ketidaksinkronan kebijakan dalam konversi tugas akhir. Fikra et al. [3] menekankan nilai tambah publikasi dan pentingnya latihan menulis artikel sejak masa kuliah. Penelitian Darmalaksana [2] serta Darmalaksana dan Hambali [7] membahas pengalaman penerapan tugas akhir berbentuk artikel di Fakultas Ushuluddin, menekankan kebutuhan regulasi dan pendampingan penulisan. Penelitian dengan Model Edwards III pada kebijakan pendidikan tinggi telah dilakukan oleh Ramadhan dan Megawati [8] terhadap kebijakan MBKM di UNESA serta Novitasari et al. [9] terhadap KIP-Kuliah, yang menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun kajian mengenai artikel ilmiah sebagai alternatif tugas akhir dan penggunaan Model Edwards III pada kebijakan pendidikan telah cukup berkembang, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kesiapan mahasiswa dalam menghadapi kebijakan rekognisi artikel jurnal di UNESA dengan menggunakan keempat variabel Edwards III secara terpadu. Kebijakan rekognisi artikel di UNESA memiliki karakteristik khusus yang meliputi persyaratan publikasi pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 4, posisi mahasiswa sebagai penulis pertama, serta mekanisme verifikasi dan penetapan rekognisi yang berbeda dari kebijakan konversi tugas akhir di perguruan tinggi lain [10] dan [11]. Penelitian ini menganalisis kesiapan mahasiswa Administrasi Publik dalam menghadapi kebijakan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi di Universitas Negeri Surabaya berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dari Model Implementasi Edwards III.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif [12]. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan mahasiswa Administrasi Publik dalam menghadapi kebijakan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan terdiri atas empat kelompok, yaitu: pengelola akademik program studi atau fakultas (1–2 orang), dosen pembimbing yang memiliki pengalaman membimbing artikel mahasiswa (1–2 orang), mahasiswa Administrasi Publik yang telah

menerima informasi kebijakan atau sedang mempersiapkan tugas akhir (4–6 orang), serta pihak pendukung administrasi atau jurnal yang mengetahui proses pengajuan rekognisi (1–2 orang). Total informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data sekunder meliputi Surat Edaran Rektor, Pedoman Tugas Akhir UNESA Edisi III, dokumen sosialisasi, dan dokumen administrasi pengajuan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan [12]. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesiapan Pengetahuan: Dimensi Komunikasi Kebijakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan mahasiswa mengetahui keberadaan kebijakan rekognisi artikel jurnal sebagai pengganti tugas akhir di UNESA. Sumber informasi yang paling banyak disebutkan adalah media sosial (Instagram resmi UNESA dan fakultas), grup WhatsApp angkatan, serta informasi dari kakak tingkat. Informan MA-1 menyatakan: "Saya tahu kebijakan ini pertama kali dari Instagram UNESA, lalu dikonfirmasi lagi di grup angkatan oleh teman yang sudah tanya ke dosen." Informan MA-3 menambahkan bahwa informasi yang diterima masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan spesifik, seperti tingkat akreditasi jurnal minimal, mekanisme pengajuan, dan proses verifikasi.

Pengelola akademik PS-1 menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui rapat program studi dan penyampaian informasi di kelas oleh beberapa dosen, namun belum terdapat sosialisasi khusus yang terstruktur dari program studi kepada seluruh angkatan. PS-1 menyatakan: "Kami sudah menyampaikan di rapat koordinasi dan beberapa dosen menyampaikan di kelas, tetapi sosialisasi khusus berbentuk forum atau seminar belum kami selenggarakan secara mandiri di prodi." Dosen pembimbing DP-1 juga mengonfirmasi bahwa informasi kebijakan masih menyebar secara tidak merata, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap substansi kebijakan bervariasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi kebijakan telah tersedia melalui berbagai kanal, kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi belum optimal. Edwards III [13] menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan tiga unsur komunikasi, yaitu transmission, clarity, dan consistency. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa unsur transmission sudah berjalan melalui media dan jaringan informal, tetapi clarity dan consistency masih lemah karena informasi yang diterima mahasiswa belum mencakup substansi kebijakan secara utuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Novitasari et al. [9] yang mengidentifikasi kendala komunikasi dalam implementasi kebijakan bantuan pendidikan tinggi, serta penelitian Dewi et al. [14] yang menekankan perlunya sosialisasi terstruktur dan koordinasi antarunit dalam implementasi kebijakan pendidikan.

3.2 Kesiapan Kemampuan dan Fasilitas: Dimensi Sumber Daya

Kesiapan sumber daya mahasiswa ditelaah melalui kemampuan menulis artikel ilmiah, kemampuan penelitian, kemampuan mencari dan mengelola referensi, pemanfaatan teknologi pendukung, akses terhadap jurnal ilmiah, ketersediaan waktu, fasilitas akademik, dan pendampingan dosen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas informan mahasiswa mengakui belum memiliki pengalaman menulis artikel jurnal ilmiah secara mandiri. Informan MA-2 menyatakan: "Selama kuliah, kami pernah mendapat tugas membuat paper atau makalah, tapi belum pernah sampai tahap submit ke jurnal. Saya belum paham sepenuhnya soal format artikel jurnal, cara sitasi yang benar, dan bagaimana memilih jurnal yang sesuai." Informan MA-5 menambahkan bahwa pengalaman menulis terbatas pada

tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar Proposal, sedangkan pelatihan khusus menulis artikel jurnal belum diikuti.

Dari sisi kemampuan penelitian, informan DP-2 menilai bahwa mahasiswa Administrasi Publik secara umum telah memiliki dasar pengetahuan mengenai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, namun kemampuan mengolah data dan membangun argumentasi ilmiah masih perlu dikembangkan. DP-2 menyatakan: "Mahasiswa sudah tahu tahapan penelitian, tetapi ketika diminta menganalisis data dan menuangkannya dalam bentuk artikel yang ringkas dan argumentatif, di situlah mereka masih kesulitan." Akses terhadap jurnal ilmiah melalui database UNESA dinilai memadai oleh informan pihak administrasi AD-1, meskipun pemanfaatannya oleh mahasiswa belum optimal. Informan MA-4 menyatakan belum familiar menggunakan tools seperti Mendeley atau Zotero secara efektif untuk mengelola referensi.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan yang mensyaratkan artikel pada jurnal terakreditasi dengan kapasitas aktual mahasiswa dalam menghasilkan artikel ilmiah. Edwards III [13] menegaskan bahwa sumber daya yang tidak memadai dapat menghambat implementasi kebijakan meskipun komunikasi telah berjalan. Kondisi ini konsisten dengan temuan Eryansyah et al. [15] bahwa kemampuan penulisan akademik mahasiswa di Indonesia tidak selalu sejalan dengan meningkatnya tuntutan institusi terhadap publikasi ilmiah, khususnya dalam aspek argumentasi analitis, parafrase, dan penggunaan referensi. Taib et al. [5] juga menekankan bahwa kemampuan menulis akademik berkembang melalui proses yang bertahap dari perencanaan, penyusunan, pengembangan, hingga revisi, sehingga mahasiswa membutuhkan pendampingan yang terstruktur dalam setiap tahapan tersebut.

3.3 Kesiapan Sikap: Dimensi Disposisi

Disposisi mahasiswa terhadap kebijakan rekognisi artikel dianalisis melalui penerimaan, motivasi, minat, persepsi terhadap manfaat dan kesulitan, kekhawatiran, serta kemauan mempersiapkan diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan mahasiswa secara umum menerima kebijakan rekognisi artikel sebagai alternatif yang positif, namun penerimaan tersebut disertai kekhawatiran yang cukup konsisten. Informan MA-1 menyatakan: "Secara konsep, saya setuju karena artikel jurnal lebih bermanfaat untuk portofolio dan pengalaman akademik, tapi saya khawatir dengan proses review yang lama dan tidak pasti apakah artikel saya bisa diterima jurnal." Informan MA-6 menyampaikan kekhawatiran serupa: "Kalau skripsi, setidaknya kita ujian di kampus sendiri. Kalau artikel, kita harus submit ke jurnal yang tidak kita kontrol prosesnya."

Persepsi terhadap manfaat kebijakan cukup positif. Informan MA-3 melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk memiliki publikasi sejak masa kuliah, sedangkan MA-4 menilai bahwa pengalaman menulis artikel jurnal dapat menjadi modal bagi mereka yang berencana melanjutkan studi pascasarjana. Namun, persepsi terhadap kesulitan juga cukup tinggi. Informan MA-2 menyatakan bahwa menulis artikel jurnal memiliki tuntutan yang berbeda dari menulis skripsi, terutama dalam hal kepadatan argumentasi, keterbatasan jumlah halaman, dan keharusan mengikuti format jurnal tertentu. DP-1 juga mengamati bahwa mahasiswa yang telah terpapar pengalaman penulisan akademik melalui mata kuliah atau workshop cenderung menunjukkan sikap yang lebih terbuka dibandingkan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman serupa.

Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi mahasiswa bersifat kondisional, yaitu penerimaan terhadap kebijakan bergantung pada tingkat kepercayaan diri, pengalaman akademik, dan kejelasan informasi mengenai proses publikasi. Edwards III [13] menyatakan bahwa disposisi positif pelaksana dapat mendukung implementasi kebijakan, sebaliknya sikap ragu atau khawatir dapat memperlambat proses pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan Kurniati dan Fithriani [16] yang menunjukkan bahwa pengalaman dan dukungan penggunaan perangkat penulisan berhubungan dengan sikap mahasiswa terhadap aktivitas menulis, serta Suyatno et al. [4] yang menemukan bahwa supervisi akademik

memiliki hubungan dengan kesiapan belajar mahasiswa melalui kompetensi pendidik. Dengan demikian, penguatan disposisi mahasiswa membutuhkan pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun keyakinan dan motivasi melalui pengalaman menulis yang terstruktur.

3.4 Kesiapan Prosedural: Dimensi Struktur Birokrasi

Kesiapan prosedural mahasiswa ditelaah melalui pemahaman terhadap pedoman, SOP, persyaratan artikel, alur pengajuan, mekanisme pembimbingan, pihak yang bertanggung jawab, proses verifikasi, dan penetapan rekognisi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan mahasiswa belum memahami secara rinci alur pengajuan rekognisi artikel. Informan MA-1 menyatakan: "Saya tahu harus publish di jurnal SINTA 4 ke atas, tapi saya belum tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pengajuan rekognisi dan ke mana harus mengajukannya." Informan MA-5 menambahkan bahwa perbedaan antara Surat Edaran Rektor tahun 2025 dan Pedoman Tugas Akhir Edisi III tahun 2026 membuat mahasiswa bingung mengenai ketentuan yang berlaku saat ini.

Pengelola akademik PS-1 menjelaskan bahwa pedoman rekognisi telah ditetapkan melalui keputusan rektor dan tersedia pada laman resmi universitas, namun mengakui bahwa pemahaman mahasiswa terhadap dokumen tersebut masih terbatas. PS-1 menyatakan: "Pedoman sudah ada, tapi memang mahasiswa jarang membaca dokumen resmi secara langsung. Mereka lebih mengandalkan informasi dari teman atau media sosial." Dosen pembimbing DP-2 menambahkan bahwa mekanisme pembimbingan untuk artikel rekognisi belum memiliki alur yang berbeda secara formal dari pembimbingan skripsi konvensional, sehingga dosen dan mahasiswa perlu menyesuaikan sendiri proses pembimbingannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur formal kebijakan telah tersedia melalui regulasi dan pedoman, pemahaman prosedural mahasiswa sebagai kelompok sasaran masih belum memadai. Edwards III [13] menekankan bahwa struktur birokrasi yang jelas, termasuk SOP dan pembagian kewenangan, menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan pedoman formal belum diikuti oleh pemahaman prosedural yang merata di kalangan mahasiswa dan bahkan sebagian dosen pembimbing. Temuan ini relevan dengan penelitian Fidhayanti et al. [6] yang menemukan bahwa ketidakjelasan SOP menjadi kendala dalam pelaksanaan konversi tugas akhir, serta penelitian Dewi et al. [14] yang menunjukkan bahwa fragmentasi birokrasi dan keterbatasan koordinasi antarunit dapat menghambat optimalisasi implementasi kebijakan pendidikan. Penguatan pemahaman prosedural perlu dilakukan melalui penyusunan panduan praktis yang ringkas, sosialisasi alur pengajuan, dan penyediaan layanan konsultasi prosedur rekognisi yang mudah diakses oleh mahasiswa.

Ringkasan temuan berdasarkan empat dimensi Edwards III disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kesiapan Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Edwards III

Dimensi Edwards III	Kondisi Kesiapan	Temuan Utama
Komunikasi	Belum optimal	Informasi tersebar melalui media sosial dan jaringan informal, belum terdapat sosialisasi terstruktur di prodi, kejelasan dan konsistensi informasi masih lemah.
Sumber Daya	Terbatas	Pengalaman menulis artikel jurnal minim, kemampuan sitasi dan pengelolaan referensi belum memadai, pemanfaatan database jurnal belum optimal.
Disposisi	Penerimaan bersyarat	Mahasiswa menerima kebijakan sebagai peluang positif, tetapi kekhawatiran terhadap proses review dan ketidakpastian publikasi cukup tinggi.

Dimensi Edwards III	Kondisi Kesiapan	Temuan Utama
Struktur Birokrasi	Belum dipahami merata	Pedoman formal tersedia, tetapi pemahaman prosedural mahasiswa terbatas, alur pengajuan dan mekanisme pembimbingan belum tersosialisasi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Kesiapan mahasiswa Administrasi Publik dalam menghadapi kebijakan rekognisi artikel jurnal sebagai pengganti skripsi di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya memadai pada keempat dimensi implementasi kebijakan Edwards III. Pada dimensi komunikasi, informasi kebijakan telah tersebar melalui berbagai kanal, namun kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi belum optimal karena belum terdapat sosialisasi terstruktur di tingkat program studi yang mencakup substansi, persyaratan, dan prosedur rekognisi secara komprehensif. Pada dimensi sumber daya, mahasiswa belum memiliki pengalaman yang memadai dalam menulis artikel jurnal ilmiah, mengelola referensi, melakukan sitasi, dan menyesuaikan naskah dengan ketentuan jurnal, meskipun dasar pengetahuan mengenai metodologi penelitian telah diperoleh melalui perkuliahan.

Pada dimensi disposisi, mahasiswa menunjukkan penerimaan bersyarat terhadap kebijakan rekognisi artikel, yaitu menerima kebijakan sebagai peluang yang positif untuk membangun portofolio akademik, namun disertai kekhawatiran terhadap proses review jurnal, ketidakpastian penerimaan artikel, dan tuntutan penulisan yang berbeda dari penyusunan skripsi. Pada dimensi struktur birokrasi, pedoman formal telah tersedia melalui keputusan rektor dan dokumen pedoman tugas akhir, namun pemahaman prosedural mahasiswa terhadap alur pengajuan, mekanisme verifikasi, dan proses penetapan rekognisi masih terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan sosialisasi kebijakan yang terstruktur, pengembangan pelatihan penulisan artikel ilmiah, pembimbingan yang terarah, dan penyusunan panduan prosedural yang praktis dan mudah diakses diperlukan agar implementasi kebijakan rekognisi artikel jurnal sebagai pengganti skripsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

REFERENSI

[1] Universitas Negeri Surabaya, “Surat Edaran Rektor UNESA Nomor B/97019/UN38/HK.01.01/2025 tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir,” Universitas Negeri Surabaya, 2025.

[2] W. Darmalaksana, “Transformasi tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah,” Repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. [Online]. Available: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/45257/

[3] H. Fikra, S. Vera, and Fitriani, “Ketentuan tugas akhir artikel ilmiah pengganti skripsi: Studi kebijakan pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” *Gunung Djati Conference Series*, vol. 37, pp. 72–84, 2024, doi: 10.15575/gdcs.v37i.2067.

[4] Suyatno, E. Istiningsih, Wantini, D. Hidayati, A. Fajria, and S. Zulaiha, “Contribution of academic supervision to vocational students’ learning readiness,” *Int. J. Eval. Res. Educ.*, vol. 12, no. 2, pp. 710–719, 2023, doi: 10.11591/ijere.v12i2.24422.

[5] S. A. Taib, N. H. Rahmat, M. S. Sim, S. M. M. Iliyas, N. Sa’adan, and N. Jenal, “Processing academic writing online: The case for process approach,” *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, vol. 12, no. 8, pp. 81–90, 2022, doi: 10.6007/IJARBSS/v12-i8/13174.

[6] D. Fidhayanti, M. A. Rofiq, M. R. Fuadi, N. C. B. Makkiy, and F. N. Putri, “Rethinking implementasi tugas akhir skripsi menjadi artikel ilmiah dalam upaya optimalisasi proses konversi (studi komparasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung),” Research Report, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. [Online]. Available: https://repository.uin-malang.ac.id/17180/

[7] W. Darmalaksana and R. Y. A. Hambali, "Penulisan tugas akhir skripsi dalam bentuk artikel ilmiah: Studi kasus Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung," Repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. [Online]. Available: https://digilib.uinsgd.ac.id/41028/

[8] S. Ramadhan and S. Megawati, "Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya," *Publika*, vol. 11, no. 1, pp. 1581–1592, 2023, doi: 10.26740/publika.v11n1.p1581-1592.

[9] S. Novitasari, D. Siswanto, and A. Ambarwati, "Improving educational equity through the Smart Indonesia Card for College: Policy implementation and challenges," *Jurnal Public Policy*, vol. 11, no. 1, 2025, doi: 10.35308/jpp.v11i1.10413.

[10] Universitas Negeri Surabaya, "Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1150/UN38/HK/2025 tentang Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir," Universitas Negeri Surabaya, 2025.

[11] Universitas Negeri Surabaya, *Pedoman Tugas Akhir UNESA Edisi III*. Surabaya, Indonesia: Universitas Negeri Surabaya, 2026.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2020.

[13] G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Washington, DC, USA: Congressional Quarterly Press, 1980.

[14] R. P. Dewi, I. D. Pramudiana, Widyawati, and D. Patria, "Analysis of the role of regional government in optimizing the School Operational Assistance Program (BOSP) policy in Surabaya as a strategy for improving education quality," *J. Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 13, no. 1, pp. 134–148, 2025, doi: 10.24269/dpp.v13i1.10613.

[15] Eryansyah, R. Inderawati, I. Petrus, and A. Saripudin, "EFL graduate students' scholarly writing proficiency and publication challenges: Evidence from some Indonesian state universities," *World J. English Lang.*, vol. 16, no. 6, p. 230, 2026, doi: 10.5430/wjel.v16n6p230.

[16] E. Y. Kurniati and R. Fithriani, "Post-graduate students' perceptions of Quillbot utilization in English academic writing class," *J. English Lang. Teach. Linguist.*, vol. 7, no. 3, pp. 437–451, 2022, doi: 10.21462/jeltl.v7i3.852.